

Perdagangan Tanpa Batas: Open Regionalisme APEC dalam Mendorong Kerja Sama Ekonomi di Asia Pasifik

Safina Rahma Syifa

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia;

Kata Kunci

Kata kunci: APEC, Asia-Pasifik, kerja sama ekonomi, regionalisme terbuka

Abstrak

Pasca perang dingin membuat menegangnya perekonomian pada berbagai negara. Kondisi tersebut mendorong tatanan dunia baru untuk membentuk regionalism dan salah satunya menghasilkan blok kerja sama perdagangan antar negara. Pembentukan blok dagang ini ditandai dengan dimulainya keberadaan forum-forum diskusi untuk membahas isu ekonomi seperti ketergantungan ekonomi hingga perdagangan bebas. APEC kemudian hadir sebagai salah satu forum kerja sama ekonomi dalam kawasan Asia Pasifik yang bergerak dalam bidang kerja sama ekonomi. Keberadaan APEC didasari dengan pandangan bahwa dinamika perkembangan dalam Asia Pasifik semakin kompleks dengan diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi yang canggih, serta perbedaan keunggulan komparatif yang dimiliki tiap negara. Oleh karena itu, penulis akan melihat bagaimana keberadaan APEC kemudian memengaruhi perdagangan dan hubungan kerja sama ekonomi yang terjadi antar negara anggotanya. Tulisan ini akan menggunakan konsep regionalisme terbuka dalam melihat dinamika yang terjadi dalam APEC.

Keywords

Keywords: APEC, Asia-Pacific, economic cooperation, open regionalism

Abstract

After the Cold War, economy in various countries became tense. These conditions encourage a new world order to form regionalism, and one of them is to produce trade cooperation blocks between countries. Discussion forums were used to establish this trading block and address economic concerns like dependence on free trade. APEC then emerged as one of the economic cooperation forums in the Asia Pacific region, which operates in economic cooperation. The existence of APEC is based on the view that the dynamics of development in the Asia Pacific are increasingly complex, characterized by significant changes in trade and investment patterns, financial flows, and sophisticated technology, as well as differences in comparative advantages possessed by each country. This study will analyze how APEC influences trade and economic cooperation among its member nations. This article will use the concept of open regionalism to look at the dynamics that occur in APEC.

*Corresponding Author: Safina Rahma Syifa, Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia.

Email: safinarsyifa@student.ub.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i4.438>

History Artikel:

Received: 12 Desember 2023 | Accepted: 28 Desember 2023

PENDAHULUAN

Kondisi pasca perang dingin membuat menegangnya perekonomian pada berbagai negara. Kondisi tersebut mendorong tatanan dunia baru untuk membentuk regionalism dan salah satunya menghasilkan blok kerja sama perdagangan antar negara. Pembentukan blok dagang ini ditandai dengan dimulainya keberadaan forum-forum diskusi untuk membahas isu ekonomi seperti ketergantungan ekonomi hingga perdagangan bebas. Pada tahun 1989, para pemimpin negara-negara yang terletak di lingkaran luar Samudra Pasifik mulai mengadakan pertemuan multilateral dan saat itu juga mendeklarasikan berdirinya *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Organisasi ini bergerak dalam bidang kerja sama ekonomi yang melatarbelakangi dimulainya saling tergantungnya negara-negara dalam kawasan Asia Pasifik. Dibentuknya kerja sama APEC tersebut didasari dengan pandangan bahwa dinamika perkembangan dalam Asia Pasifik semakin kompleks dengan diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi yang canggih, serta perbedaan keunggulan komparatif yang dimiliki tiap negara.

APEC merupakan salah satu forum kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang cukup menarik perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Forum ini relatif agresif dalam membahas isu-isu ekonomi dalam kawasan, khususnya upaya peningkatan akses pasar dan perjanjian perdagangan dalam kawasan Asia Pasifik. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, APEC juga telah memulai pembahasan mengenai langkah lebih lanjut dalam upaya pembentukan *Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP)* (Prasetyo, 2011). Namun, berkembangnya keberadaan FTA dalam APEC sendiri juga memiliki dampak negatif. Seperti, terdapatnya indikasi bahwa perjanjian perdagangan yang terjadi antar negara dalam kawasan ini mengalami tumpang tindih dalam skema perdagangan bebas. Efek negatif tumpang tindih ini sering disebut dengan istilah "*Noodle Bowl*" (Nugroho & Jati, 2018). Hal ini sangat dikhawatirkan karena dirasa dapat menghambat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kawasan.

Saat ini, APEC memiliki total penduduk sebanyak 4,1 miliar jiwa dari total 8 miliar jiwa penduduk di dunia. Itu artinya, setengah dari perdagangan yang dilakukan di dunia juga terjadi dalam organisasi ini (Dwi, 2023). Hal tersebut tercerminkan pada fakta bahwa APEC mencakupi sekitar 62% PDB dunia pada tahun 2021, atau sekitar 52,8 US dolar (APEC, 2023). Hal tersebut dikarenakan banyak negara dengan perekonomian kuat yang tergabung dalam APEC, seperti Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Tiongkok. Sudah

terbentuk 46 bilateral FTAs (*Free Trade Agreements*) dan masih ada 12 perjanjian perdagangan dalam kawasan Asia Pasifik yang masih dalam tahap negosiasi. Peningkatan perdagangan di antara negara-negara terlibat membuat munculnya berbagai pembahasan ekonomi yang dimaksudkan untuk saling menguntungkan satu sama lain, baik dalam lingkup bilateral maupun regional.

Integrasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama yang ada di tengah negara-negara sejak berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1992, Uni Eropa sebagai salah satu organisasi regional telah membentuk *Single European Market*, dan menyusul hal tersebut, Amerika Serikat pada tahun 1994 juga membentuk *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*. Kedua integrasi ekonomi regional tersebut merupakan pendorong dari terbentuknya kerja sama ekonomi untuk mencapai integrasi ekonomi di berbagai kawasan. Terbentuknya SEM dan NAFTA menjadi salah satu faktor yang juga dilihat sebagai munculnya integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik (Office of the Historian, n.d.).

Hal ini tentu saja ditujukan untuk menghadapi persaingan ekonomi yang terjadi di tengah era globalisasi, di mana lintas batas perdagangan menjadi semakin kabur. Di mana integrasi ekonomi sendiri menjadi salah satu penguat posisi politik dan ekonomi suatu negara dalam persaingan global. Menanggapi persaingan global dalam perdagangan yang semakin kompetitif, Bob Hawke, Perdana Menteri Australia pada saat itu, menyatakan ide gagasannya untuk membentuk integrasi ekonomi dalam kawasan Asia Pasifik pada 31 Januari 1989 dalam pidatonya yang disampaikan di Seoul, Korea Selatan (APEC, 2019). Pidato tersebut kemudian membuat 12 negara yang ada dalam kawasan Asia Pasifik mengadakan forum pertemuan pertama di Canberra, Australia untuk membentuk *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* dalam jangka waktu 10 bulan setelahnya, sehingga APEC resmi terbentuk pada November 1989.

Sebagai forum ekonomi dalam kawasan Asia Pasifik, APEC dibentuk untuk menghadapi ketergantungan ekonomi yang terjadi antara negara-negara anggota. Di sisi lain, kekuatan Jepang dalam mendominasi ekonomi pada kawasan Asia juga menjadi salah satu penyebab yang melatarbelakangi lahirnya keberadaan APEC selain untuk membentuk pasar baru bagi produk hasil pertanian dan bahan mentah. Pembentukan APEC ditujukan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, seimbang, dan inovatif sehingga dapat mempercepat integrasi ekonomi dalam kawasan Asia Pasifik (APEC, 2019). Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN pada awalnya menginginkan keberadaan forum ekonomi regional tanpa Amerika Serikat. Namun, hal tersebut

mendapatkan kritik langsung dari Amerika Serikat dan Jepang.

Perbedaan bahasa dan budaya di antara negara-negara sekitar Asia Pasifik membuat APEC secara masif mempromosikan *Pacific RIM* (lingkar pasifik). Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand merupakan *founding members* yang ikut terlibat dalam pembentukan APEC dan menjadi anggota pada tahun 1989. Sedangkan negara-negara seperti Hongkong, Taiwan, dan Tiongkok memutuskan bergabung pada tahun 1991. Tidak berhenti sampai situ, pada saat itu APEC menjadi forum ekonomi regional yang menarik bagi negara-negara di sekitar Asia Pasifik, sehingga pada tahun 1993-1994, Chili, Meksiko, dan Papua Nugini resmi bergabung menjadi anggota APEC. Dan terakhir di tahun 1998, Peru, Rusia, dan Vietnam juga ikut bergabung ke dalam APEC dan melengkapi keanggotaan menjadi 21 negara.

Dalam lima tahun pertama, APEC mempromosikan keberadaan liberalisasi perdagangan bebas dalam kawasan lingkaran pasifik sebagai prinsip dasar dari organisasi ini. Pada pertemuan yang dilaksanakan di Bogor pada tahun 1994, APEC menyepakati gagasan mengenai perdagangan bebas diikuti dengan pembukaan perdagangan bebas dalam kawasan dan membuka investasi untuk negara anggotanya yang selanjutnya dikenal sebagai *Bogor Goals* (Office of the Historian, n.d.). Tujuan dari gagasan tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kawasan Asia-Pasifik melalui aspek perekonomian. Dalam mewujudkan kesejahteraan yang dimaksud, APEC melakukan dorongan juga memfasilitasi segala aspek dalam bidang perdagangan serta investasi. Hal tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam pilar kerja sama yang dimiliki oleh APEC (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022), yaitu:

- 1) Perdagangan dan investasi terbuka. Hal ini dilakukan dengan mengurangi hambatan seperti tarif dan perlahan menghilangkan tarif serta non-tarif dalam perdagangan antara negara kawasan Asia Pasifik.
- 2) Fasilitas perdagangan dan investasi. Hal ini memfokuskan pada adanya pengurangan biaya transaksi, melakukan peningkatan informasi terkait aktivitas perdagangan dan investasi, serta melakukan penyesuaian kebijakan dan kemudahan administrasi pelabuhan.
- 3) Kerja sama ekonomi dan teknik. Berupa dilakukannya pelatihan dalam bidang teknologi bagi negara-negara anggota, sehingga dapat bersaing dalam pasar global yang kompetitif.

Kerja sama regional ini kemudian berdampak terhadap estimasi tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana APEC pada tahun 2014, dilaporkan *World Bank* memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 4.7%, sedangkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya berada pada angka 3.8%. Hal tersebut menandakan adanya bentuk stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam kawasan Asia Pasifik yang disebut sebagai hasil dari penyesuaian kebijakan yang mereka miliki. Di sisi lain, APEC juga mendorong pertumbuhan perdagangan dalam kawasan dengan adanya penurunan tarif dagang dari awal mulanya 16.9% menjadi hanya 5.7% pada tahun 2012 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Dalam dimensi ekonomi, APEC menjadi salah satu bentuk *regional architecture* atau struktur sistem kawasan dalam membangun perekonomian anggotanya. Integrasi ekonomi dalam kawasan dilakukan APEC melalui pembentukan *Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP)*.

Dorongan dari pembentukan FTAAP sendiri dilakukan oleh *APEC Business Advisory Council's (ABAC)* yang merupakan perwakilan forum dari sektor kebijakan ekonomi publik dan swasta dalam kawasan Asia Pasifik. Dengan adanya pembentukan FTAAP, kemudian diharapkan dapat memudahkan peningkatan perdagangan dan investasi, di mana sebelumnya keambiguan terjadi dalam biaya dan beban administratif yang membuat kegiatan ekonomi terjadi secara kompleks (Prasetyo, 2011). APEC dalam hal ini dijadikan sebagai salah satu kendaraan oleh sektor swasta untuk mempermudah kegiatan perdagangan sehingga membuka peluang yang lebih besar. Dalam komoditas tertentu, anggota APEC dapat memasok sekitar 75% atau setara sekitar 66% dari total ekspor dalam kawasan yang tergabung menjadi anggota APEC (Janow, 1996). Kemudian APEC juga merepresentasikan sekitar 44% perdagangan dunia dan menghasilkan sekitar 53% GDP dunia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam bidang ekonomi, APEC berkontribusi pada tata kelola ekonomi trans-Pasifik.

Walaupun bergerak atas dasar integrasi ekonomi, banyak hal-hal politis yang juga ditemukan dalam APEC. Terdapat 21 negara anggota yang juga membawa kepentingan ekonomi negara masing-masing ke dalam agenda forum ini. Dalam aspek politik, APEC menggunakan *soft law approach* dalam menjabatani kepentingan-kepentingan anggotanya, baik dari negara maupun dari pihak swasta. Kontribusi APEC dalam hal ini dianggap memperkuat pondasi politik dalam mengatasi fragmentasi yang muncul dari proses regionalism dalam kawasan Asia (Hsieh, 2013). Kemunculan dari Amerika Serikat dalam APEC sendiri merupakan salah satu aspek politik yang paling mudah untuk dideteksi. Amerika Serikat turun dalam

kerja sama ini untuk melebarkan liberalisasi sampai ke dalam kawasan Asia melalui aspek ekonomi. Hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat yang menjabat pada saat itu, dalam KTT APEC pada tahun 1993.

Meskipun, APEC bukanlah organisasi kerja sama ekonomi yang bersifat *legally binding* namun lebih bersifat *collective peer pressure*, hal tersebut malah dirasa efektif dalam mendorong terciptanya *regional architecture* dalam kawasan (Prasetyo, 2011). Salah satu misi dari keberadaan APEC adalah menciptakan kawasan dengan *free trade and investment* bukanlah sesuatu yang mudah dicapai dan membutuhkan proses yang panjang. Namun hal ini terus diusahakan dan dibuktikan dengan fasilitas dan dorongan yang diberikan dalam aspek kebebasan dan keterbukaan perdagangan serta investasi dalam kawasan. Tidak hanya itu, APEC sebagai sebuah intetas organisasi juga berusaha untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan kapasitas ekonomi anggota yang tergabung di dalamnya.

Pemerintah dan pihak swasta merupakan dua pihak yang saling berelasi dalam kerja sama ini sehingga tidak mungkin menyebut APEC sebagai kerja sama yang murni membicarakan ekonomi tanpa ada aspek politik di dalamnya. Pihak swasta sendiri dalam hal ini diikategorikan sebagai bagian dari *APEC Business Advisory Council's (ABAC)* di mana mereka memperjuangkan kepentingan bisnis dalam APEC terkait tarif perdagangan dan pasar bebas dalam kawasan Asia. Selain itu, APEC yang selama ini dikenal sebagai forum untuk bidang perekonomian, nyatanya memiliki aspek politik yang dapat dilihat melalui keterlibatan anggota secara politik untuk mempertahankan kemerdekaan, keuntungan, dan kebebasan yang mencerminkan kepentingan politik. Kesadaran anggota APEC dalam keamanan regional juga meliputi stabilitas politik, secara tidak langsung, anggota APEC selalu membawa agenda politik dan keamanan nasionalnya untuk didahulukan (Langdon & Job, 1993).

Kerja sama APEC telah berjalan selama 34 tahun terhitung sejak tahun 1989 sampai 2023. Peningkatan ekonomi dan investasi regional melalui perdagangan bebas merupakan tujuan utama dibentuknya APEC untuk meningkatkan tingkat perekonomian kawasan Asia Pasifik. Rencana untuk menggagas FTAAP merupakan salah satu bentuk keseriusan APEC dalam mencapai tujuannya dalam bidang ekonomi. Namun, proses regionalism sendiri bukanlah sesuatu yang mudah sehingga terjadi banyak tantangan dan kendala dalam perjalanannya. Dalam dimensi ekonomi, APEC terlihat signifikan dalam aspek perekonomian anggotanya.

Open Regionalisme

Open regionalism atau regionalisme terbuka hadir untuk menyelesaikan masalah utama yang terjadi dalam kebijakan perdagangan kontemporer, yaitu bagaimana mencapai kesesuaian di tengah banyaknya perjanjian terkait perdagangan regional di dunia dan sistem perdagangan global yang diwujudkan dalam *World Trade Organization (WTO)*. Konsep ini berupaya untuk memastikan bahwa perjanjian-perjanjian regional pada praktiknya akan menjadi landasan bagi liberalisasi global yang lebih lanjut dan tidak menjadi hambatan yang menghalangi kemajuan tersebut. Regionalisme terbuka telah diadopsi sebagai prinsip dasar dari *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)* sejak pembentukannya pada tahun 1989. Organisasi ini melibatkan tiga negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. APEC digagas untuk mencapai perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka dalam kawasan. Melihat besarnya cakupan negara yang tergabung dalam APEC, organisasi ini dilihat sebagai organisasi perdagangan regional dengan jangkauan terjauh dalam sejarah.

Sampai saat ini, masih belum ada definisi yang pasti mengenai regionalisme terbuka, namun ada beberapa kemungkinan pengertian dari regionalisme terbuka. Yang pertama, regionalisme terbuka didefinisikan sebagai sebuah konsep dengan keanggotaan terbuka dalam melakukan aturan kawasan. Negara manapun yang menunjukkan ketersediaan untuk menerima aturan yang dibuat dari organisasi tersebut, akan diperbolehkan untuk bergabung. Dengan begitu efek dari liberalisasi perdagangan dari kelompok tersebut akan meluas ke banyak negara dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Pendekatan ini akan mengubah pengertian "regional" menjadi sesuatu yang lebih luas dan kemudian melepas karakter dari kawasan tersebut.

Konsep lain yang hadir untuk mengartikan regionalisme terbuka adalah perlakuan MFN (*most favored nation*) tanpa syarat. MFN merupakan bentuk prinsip yang mendorong pemberian perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota WTO. Liberalisasi perdagangan APEC akan diperluas tanpa syarat ke seluruh mitra dagang yang dimiliki anggota dan tidak ada preferensi atau diskriminasi baru yang akan tercipta. Pemberian perlakuan MFN tanpa syarat ini memiliki beberapa daya tarik, contohnya karena mampu menghilangkan keperluan untuk menyusun ketentuan asal barang dan rencana rinci untuk memenuhi syarat sebagai organisasi dengan kawasan perdagangan bebas. Hal ini dapat menghindari tuduhan dunia bahwa organisasi tersebut melakukan tindakan yang bersifat preferensial dan diskriminatif. Dengan demikian, hal ini akan menghindari risiko munculnya konflik perdagangan baru dalam memaksimalkan

sistem perdagangan global.

Pengertian lain dari regionalisme terbuka adalah bagaimana anggota APEC terus berusaha mengurangi hambatan perdagangan secara global untuk mengejar tujuan regional yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan dengan melanjutkan praktik liberalisasi unilateral dan negosiasi multilateral dalam WTO di masa lalu. Kedua pendekatan tersebut dilakukan untuk menghindari terbentuknya diskriminasi baru sehingga dapat dilihat sebagai definisi yang tepat dari regionalisme terbuka. Meskipun, regionalisme terbuka belum terdefinisi secara pasti, jika diterapkan dengan tepat, memungkinkan untuk menghasilkan perdagangan bebas yang luas dalam lingkup regional dan global. Hal ini dapat memberikan jawaban terhadap potensi konflik antara konsep regionalisme dan globalisme dengan memasukkan semua inisiatif liberalisasi regional ke dalam perjanjian perdagangan bebas global dan menghilangkan semua pengaturan preferensial.

Free Trade Area

Free Trade Area dikatakan merupakan keadaan dimana melalui perdagangan tanpa halangan kebijakan proteksi negara kesejahteraan dapat disebarluaskan, karena dengan menganut konsep keuntungan komparatif setiap Negara akan mampu memastikan keuntungannya masing-masing dalam perdagangan. Hal ini juga terjadi pada negara-negara di APEC tentunya setiap Negara anggota APEC berusaha untuk memastikan keuntungan perdagangan masing-masing negaranya. David Balaam dan Michael Veseth mengidentifikasi *Free Trade Area* lebih lanjut sebagai salah satu derajat menuju integrasi ekonomi. Di dalam integrasi ekonomi sekelompok negara setuju untuk mengabaikan batasan-batasan negara mereka untuk tujuan ekonomi tertentu, sehingga membentuk system pasar yang lebih besar dan terikat.

Dalam hal ini integrasi ekonomi sendiri terdiri atas beberapa level antara lain:

- 1) Level pertama, pembentukan *Free Trade Area*, dimana Negara-negara anggota setuju untuk menghapus hambatan tariff terhadap perdagangan barang dan jasa dari luar kawasan tersebut belum ditentukan.
- 2) Level kedua, berikutnya dari integritas ekonomi adalah *customs union*, dimana selain Negara-negara anggota setuju untuk berdagang secara bebas tarif dalam batasan kolektif mereka, suatu set tariff yang seragam juga diberlakukan untuk produk-produk dari luar free trade area tersebut. Dalam tingkat ini, eliminasi hambatan-hambatan non-tariff masih belum ditentukan.
- 3) Level ketiga, *economic union* yang merupakan tingkat terakhir dari integrasi politik dan

ekonomi, dimana integrasi penuh pasar telah dapat tercapai. Pada tingkat ini hambatan non-tariff sudah dieliminasi, sebagaimana hambatan tariff pun dihilangkan. Kerjasama ekonomi dibidang perdagangan internasional saat ini mengarah kepada pembentukan kerjasama guna mewujudkan integrasi ekonomi dan keuangan regional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, analisis kebijakan perdagangan, dan evaluasi implementasi kebijakan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam kerangka Open Regionalisme APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Analisis deskriptif akan fokus pada pembahasan kebijakan perdagangan, dampaknya terhadap kerja sama ekonomi di wilayah tersebut, dan peran APEC dalam mendorong integrasi ekonomi.

Sumber data meliputi: (1) Dokumen Kebijakan APEC: Analisis dokumen resmi APEC, seperti pernyataan kebijakan, laporan tahunan, dan agenda pertemuan, akan memberikan wawasan mendalam tentang strategi dan tujuan Open Regionalisme APEC; (2) Publikasi Akademis: Studi literatur dari publikasi akademis, jurnal ekonomi, dan buku-buku terkait akan digunakan untuk mendukung analisis literatur mengenai konsep open regionalisme dan pengaruhnya terhadap kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik; (3) Data Statistik Perdagangan: Data perdagangan internasional, indeks globalisasi, dan indikator ekonomi relevan akan digunakan untuk memperkuat analisis dampak perdagangan tanpa batas terhadap integrasi ekonomi di wilayah Asia Pasifik.

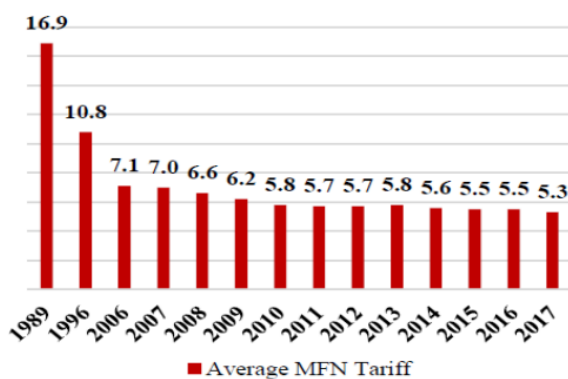
Analisis data akan melibatkan interpretasi dan sintesis informasi dari sumber-sumber tersebut. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat antara implementasi kebijakan perdagangan dan kerja sama ekonomi di Asia Pasifik. Hasil analisis akan membantu memahami sejauh mana Open Regionalisme APEC telah berhasil dalam mendorong kerja sama ekonomi di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deklarasi *the Bogor Goals* yang merupakan hasil dari KTT APEC tahun 1994 yang disepakati negara anggota APEC sebagai bentuk komitmen jangka panjang untuk meningkatkan liberalisasi pasar dan juga investasi di kawasan Asia Pasifik untuk menghasilkan kemakmuran bersama dalam kawasan Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation, 2018). Hal ini sejalan dengan konsep *state-centric*

liberal yang melihat bahwa partisipasi negara dalam forum didasari pada keinginan negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan masalah kawasan. Tahun 2020 sendiri disepakati sebagai tahun target paling lambat dalam merealisasikan komitmen jangka panjang tersebut. Dalam upaya mencapai target tersebut, APEC telah berhasil memberikan kemajuan yang substantial dalam liberalisasi tarif, di mana pada tahun 2014 dan 2017, rata-rata tarif MFN di kawasan APEC turun yang awalnya berada pada angka 5.6% menjadi 5.3% dengan tarif produk pertanian lebih tinggi daripada tarif non-pertanian.

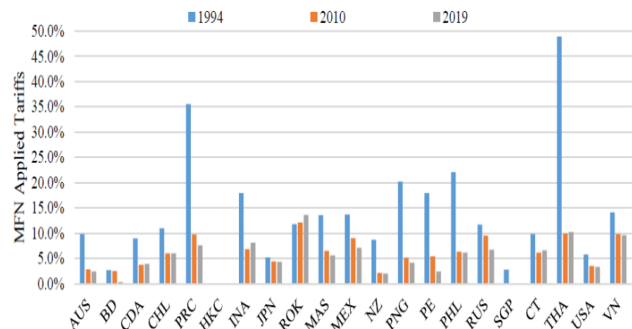
Untuk produk pertanian yang awalnya berada pada angka 11.9% juga turun menjadi 11.4%, sedangkan untuk produk non-pertanian juga menurun dari 4.6% menjadi 4.4% (APEC Policy Support Unit, 2018). presentase produk dengan tarif nol di APEC sendiri meningkat dari 45.4% menjadi 47.9%. APEC juga melaporkan keterlibatan mereka dalam liberalisasi perdagangan melalui negosiasi dan implementasi RTA/FTA. Terlihat dari jumlah RTA/FTA yang diberlakukan terus meningkat serta pihak penandatanganan telah menerapkan tarif secara bertahap sebagaimana telah disetujui dalam RTA/FTA.



Gambar 1 Grafik rata-rata MFN Applied Tariff dalam kawasan Asia Pasifik, tahun 1989- 2017 (Sumber: APEC Policy Support Unit)

Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh WTO *Trade Policy Review Body*, jumlah ukuran pembatasan perdagangan selain tarif, menurun dalam beberapa tahun terakhir dalam kawasan APEC. Namun dilakukan upaya jumlah pemulihan perdagangan yang diberlakukan oleh anggota APEC, yang mana meningkat secara signifikan dibandingkan periode-periode sebelumnya, khususnya pada penerapan anti-dumping. Ekonomi APEC sudah menerapkan dan memfasilitasi perdagangan non-tarif seperti percepatan prosedur bea cukai, penghapusan persyaratan perizinan impor, pencabutan larangan ekspor dan penerapan ekspor *rebate*, terjadinya perlambatan dalam implementasi perdagangan baru

yang tidak hanya dalam wilayah APEC, namun juga pada wilayah lainnya. Ketika ekonomi APEC melaporkan penerapan larangan ekspor dan impor, pembatasan atau perizinan, mereka biasanya menunjukkan bahwa langkah-langkah itu konsisten dengan WTO dan berdasarkan alasan yang sah, seperti perlindungan kesehatan masyarakat, keselamatan, moral, lingkungan, kebutuhan untuk menjaga keamanan dalam negeri atau pentingnya menjaga konsistensi dengan perjanjian internasional.



Gambar 2 Grafik MFN Applied Tariffs di tiap negara anggota APEC tahun 1994-2019 (Sumber: APEC Policy Support Unit)

Selain itu, upaya untuk menciptakan integrasi ekonomi di berbagai kawasan yaitu salah satunya dengan dibentuknya *Free Trade Agreements (FTAs)* dan *Regional Trading Agreements (RTAs)*. Dengan bergitu AEC *Business Advisory Council (ABAC)* beranggapan bahwa dengan dibentuknya *Free Trade Area of Asia Pacific (FTAAP)* dapat bermanfaat dalam meningkatkan perdagangan serta kemakmuran ekonomi pada kawasan. Tak hanya itu, dengan adanya FTAAP ini juga diharapkan dapat menghindari atau mengatasi dampak dari *noodle bowl* atau *spaghetti bowl*, yaitu sesuatu yang dapat menghambat serta membingungkan dunia usaha seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) (Nugroho & Jati, 2018). FTAAP dikatakan akan meningkatkan lingkup pasar sebesar 41% dari populasi dunia, membentuk 58% dari GDP dunia, serta membentuk 45% dari perdagangan dunia yang mana lebih besar dari TPP ataupun RCEP, pembentukan FTAAP akan menurunkan tarif dalam ekonomi APEC yang mana dianggap akan memberikan dampak baik pada perdagangan dan juga investasi (Asia-Pacific Economic Cooperation, 2004).

Adapun dua tuntutan untuk mewujudkan FTAAP yaitu, pertama, tuntutan keterbukaan perdagangan serta investasi di kawasan Asia Paifik, yang mana akan memberikan kesejahteraan yang lebih kepada masyarakat kawasan. Kedua, adanya FTAAP dapat mengatasi dampak buruk dari batas-batas pengelompokan *Free Trades Area (FTA)* lebih kecil di Asia Pasifik yang hanya memberikan keuntungan

secara terbatas kepada negara tertentu. Gagasan mengenai pembentukan FTAAP dimulai dari masukan yang diberikan oleh ABAC pada tahun 2004. Masukan yang pertama muncul pada pertemuan APEC *Economic Leader's Meeting* (AELM APEC) yang berlokasi di Santiago, Chili ini kemudian mendapat penolakan tegas dari negara anggota, ABAC mengusulkan supaya negara anggota APEC untuk mempelajari fisibilitas yang didapatkan dari FTAAP. Hal ini kemudian juga didasari oleh anggapan bahwa banyak FTA dalam suatu kawasan akan memunculkan *noodle bowl* yang menyulitkan berjalannya aktifitas bisnis karena bersifat sangat kompleks (Prasetyo, 2011).

Pengadaan FTAAP juga dianggap dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang besar dalam sektor perdagangan dan juga investasi kawasan. Namun, karena APEC merupakan organisasi yang mengedepankan kedaulatan anggotanya dan tidak bisa memaksa untuk langsung sepakat, yang membuat pembahasan mengenai FTAAP melalui pertemuan yang panjang. Dua tahun kemudian pada tahun 2006, proposal pengkajian mengenai FTAAP baru diterima APEC pada pertemuan AELM APEC di Hanoi, Vietnam. Jajaran pemimpin APEC memberikan arahan pada para pejabat tinggi pemerintahan negara anggota untuk mengkaji pembentukan FTAAP karena dianggap dapat mendorong terjadinya *Regional Economic Integration (REI)*. Meskipun kemudian perundingan ini juga berjalan sangat lambat karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan di antara negara-negara anggota.

Amerika Serikat muncul sebagai negara yang paling ragu terhadap gagasan tersebut. Jepang juga menentang karena sudah memiliki kepentingan lain dalam *Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA)* yang beranggotakan ASEAN+6. Terdapat juga Tiongkok yang mengatakan telah memiliki kepentingan lain dalam *East Asia Free Trade Area (EAFTA)* yang berisikan ASEAN+3 (Prasetyo, 2011). Namun, setelah beberapa diskusi dan menimbang kepentingan nasional dan keuntungan bersama yang dihasilkan, membuat Amerika Serikat dan Jepang yang awalnya menolak dengan tegas gagasan FTAAP menjadi mendukung agenda tersebut. Amerika Serikat mendukung agenda tersebut karena menginginkan keterlibatan yang besar dalam kawasan Asia. Sementara Jepang yang awalnya juga menolak, berubah menjadi mendukung karena Amerika Serikat, yang merupakan mitra dagang terbesar Jepang, kemudian berubah ikut mendukung gagasan tersebut. Jepang juga merasa

bahwa FTAAP tidak akan menghalangi agenda CEPEA yang dimiliki.

Dapat dilihat bahwa, negara anggota dengan perekonomian maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura beranggapan bahwa FTAAP akan memajukan integrasi ekonomi dalam kawasan Asia Pasifik menjadi lebih efektif karena dapat menghasilkan terbukanya pasar dan perekonomian hingga merevitalisasi APEC. Namun, negara anggota dengan ekonomi berkembang, seperti Filipina, Indonesia, dan Malaysia menganggap bahwa keberadaan FTAAP merupakan sesuatu yang sulit untuk direalisasikan dalam kawasan Asia Pasifik karena APEC memiliki sifat yang *voluntary* dan *non-binding*. *Voluntary* dan *non-binding* sendiri berarti bahwa semua kesepakatan yang terjadi dalam APEC merupakan tindakan sukarela dan tidak mengikat anggota (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019). Negara-negara dengan ekonomi berkembang berasumsi bahwa dengan keberadaan FTAAP, kemudian akan mengubah APEC menjadi organisasi formal yang memiliki hukum yang mengikat di dalamnya.

Selanjutnya pada tahun 2008, pada pertemuan AELM APEC yang dilaksanakan di Lima, Peru, para perwakilan pemimpin negara anggota APEC menginstruksikan menteri dan pejabat dalam negara anggota untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam melihat prospek dan kemungkinan terjadinya FTAAP (Asia-Pacific Economic Cooperation, 2008). Yang kemudian diikuti dengan diskusi mengenai pengembangan kapasitas ekonomi guna mendorong implementasi FTAAP sebagai *long term prospect*. Dan dalam pertemuan AELM APEC pada tahun 2010 yang diselenggarakan di Yokohama, Jepang, mulai disepakati agenda pengambilan langkah konkret dalam mewujudkan FTAAP. Hal tersebut meliputi pengembangan program kerja dalam bidang investasi, jasa, *e-commerce*, *rules of origin*, *standards and conformance*, dan fasilitas perdagangan (Asia-Pacific Economic Cooperation, 2010).

Kemudian pada tahun 2014, disepakati *The Beijing Roadmap for APEC'S Contribution to the Realization of the FTAAP*, yang menunjukkan keseriusan negara anggota APEC dalam mewujudkan FTAAP (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2016). Penetapan *roadmap* ini kemudian juga sejalan dengan *Collective Strategic Study on Issues Related to the Realization of the FTAAP* pada tahun 2015. *Collective study* ini diikuti oleh 21 negara anggota APEC guna untuk menganalisis pelajaran yang didapat dari macam-macam *building blocks* yang ada dengan tujuan menghasilkan nilai tambahan dalam pembentukan FTAAP. Hasil dari *collective study* ini kemudian akan dilaporkan dalam AELM APEC pada tahun 2016 di Lima, Peru. AELM APEC pada tahun

2016 tersebut kemudian menghasilkan *Lima Declaration on FTAAP* yang menegaskan komitmen negara anggota APEC dalam menghasilkan integrasi ekonomi regional (Asia-Pacific Economic Cooperation, 2016). Laporan implementasi kemudian diharapkan dapat diberikan secara berkala pada tahun 2018 dan 2020.

Laporan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa adanya kemajuan dalam berbagai bidang seperti tarif, layanan sosial, investasi, fasilitas perdagangan, dan kualitas aturan (APEC Policy Support Unit, 2018). Beberapa kekurangan yang disoroti dalam laporan tahun 2018 ini antara lain adalah bagaimana masih tingginya tarif untuk produk pertanian, pembatasan baru dalam pertukaran aliran data *cross-border* pada bidang pelayanan, dan semakin maraknya masalah perdagangan terkait dengan sanitasi dan fitosanitasi yang belum terselesaikan. Sementara, dalam laporan tahun 2020, dengan munculnya pandemi COVID-19 membuat lebih banyaknya perdagangan fasilitas kesehatan terjadi dibanding tindakan pembatasan perdagangan. Beberapa negara anggota APEC menerapkan tindakan pengurangan atau bahkan penghapusan tarif impor sementara untuk memfasilitasi impor obat-obatan, persediaan medis, alat media, dan produk pelindung diri (APEC Policy Support Unit, 2020). Seperti bagaimana Indonesia menghilangkan tarif impor, sementara untuk barang medis dan farmasi menjadi barang penting selama terjadinya COVID-19. Barang-barang ini juga terbebas dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan.

Dengan 2020 yang ditetapkan sebagai tenggat tahun terakhir dalam merealisasikan *the Bogor Goals*, keberlanjutan integrasi pasar, perdagangan bebas, dan juga investasi di Asia Pasifik kedepannya kemudian dipertanyakan. Meskipun APEC telah berhasil meningkatkan tindakan kolektif dalam penurunan hambatan perdagangan dan investasi, tetapi hal tersebut bukan berarti APEC telah berhasil menerapkan integrasi pasar dalam Asia Pasifik. Hal tersebut didasari oleh isu bagaimana negara-negara anggota memiliki opini dan pertimbangan yang berbeda-beda yang membuat sulitnya pencapaian tersebut. Dalam KTT APEC pada 2020 kemarin, disepakatinya agenda APEC *Post-2020 Vision* yang diberi nama APEC Putrajaya Vision 2040 yang dilandaskan pada kelanjutan implementasi nilai yang ada dalam *the Bogor Goals* (Asia-Pacific Economic Cooperation, 2020b). Dalam pertemuan ini, disahkan juga Deklarasi Kuala Lumpur yang berisikan bagaimana negara anggota APEC akan memfasilitasi perdagangan vaksin yang bebas dan terbuka dalam langkah melawan COVID-19 dan juga upaya dalam mendorong pemulihan

ekonomi dalam kawasan (Asia-Pacific Economic Cooperation, 2020a).

Tren integrasi ekonomi dalam kawasan Asia Pasifik merupakan perkembangan regional yang sulit dihindari negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Indonesia. Bahkan, Indonesia sebenarnya telah lama terlibat proses guliran integrasi ekonomi kawasan. Proses pembentukan FTA ASEAN hingga terbentuknya AEC 2015, APEC-Bogor Goals (1994) dan beberapa FTA bilateral maupun regional yang dilakukan seperti *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Mengenai FTAAP, Indonesia awalnya merupakan salah satu anggota APEC yang enggan akan konsep tersebut walaupun akhirnya mendukung FTAAP sebagai "*a long-term prospect*" dan perlu dilakukan kajian-kajian lebih lanjut dalam pembentukan FTAAP. Secara garis besar, kurangnya antusias Indonesia akan FTAAP didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, dikhawatirkan terbentuknya FTAAP dapat mengubah *nature* APEC yang *voluntary* menjadi *legally binding* dan *legal based* karena setiap FTA pasti dilakukan melalui perundingan yang mengikat. Kedua, Indonesia lebih mendorong tercapainya Bogor Goals terlebih dahulu. Ketiga, hingga kini Indonesia masih memfokuskan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) dan terdapat kekhawatiran pula bahwa terbentuknya FTAAP akan mengancam AEC.

Mengenai proses TPP sebagai building block FTAAP, posisi Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan posisi terdahulunya. Walaupun belum memiliki rencana bergabung, Indonesia tidak *resistance*, menyambut positif sejumlah anggota APEC yang bergabung sebagai sebagian proses pembentukan regional arsitektur di kawasan. Kurang antusiasnya Indonesia bergabung ke dalam TPP memang dilandaskan pada asumsi yang mendasar, yaitu penekanan kepentingan nasional, strategi pengamanan kepentingan domestik, optimalisasi FTA sesuai konsentrik paling dekat seperti AFTA, CAFTA, dan beberapa kesepakatan secara bilateral (IJEPA), yang telah dilakukan sebelum masuk pada blok FTA yang lebih besar.

Dengan semakin banyaknya negara-negara ASEAN (Brunei Darusalam, Singapura, Malaysia, Vietnam) dan negara-negara di Asia Pasifik yang bergabung dalam TPP, Indonesia perlu untuk merumuskan kembali dan mengkaji langkah-langkah yang harus diambil jika TPP semakin berkembang dan berubah menjadi FTA regional di kawasan. Sebaliknya pula, Indonesia juga harus semakin cepat melaksanakan perbaikan dan reformasi struktural dalam negeri, konektivitas domestik yang dapat mempercepat perdagangan intra kawasan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan *behind the borders*. Hal sensitif lainnya adalah Indonesia

harus pula mampu bersikap bijak, mengombinasikan antara kebijakan perdagangan bebas dengan melindungi kepentingan dalam negerinya, khususnya sektor pertanian, industri dan sektor sensitif lainnya.

Perjalanan APEC dalam upaya meningkatkan integrasi dalam kawasan tidaklah mudah. Pada KTT APEC 2003 saja terdapat dua hal penting yang mengindikasikan adanya perseteruan dan perpecahan dalam tubuh APEC. Seperti biasanya, di sela pertemuan APEC 2003, Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan-pernyataan diplomatis yang dapat membahayakan kesatuan anggota-anggota APEC. Dalam KTT APEC 2003, lewat Condoleezza Rice, yang waktu itu menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional Bush, AS mengecam PM Malaysia. Kecaman ini dilontarkan AS sehubungan dengan pernyataan Mahathir pada KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) bahwa Yahudi mengatur dunia secara tidak langsung. AS mengatakan, pernyataan Mahathir seperti itu bukan hanya terjadi sekali, tetapi sudah beberapa kali dan AS tidak dapat mentolerir pernyataan rasis semacam itu. Tentu saja pernyataan AS ini menciptakan suatu perseteruan diplomatic antara AS dan Malaysia. Bila hal ini dibiarkan saja, besar kemungkinan bahwa keharmonisan antar anggota APEC dapat terganggu.

Ketika pertemuan para pemimpin APEC berlangsung di Santiago, para pebisnis dan ekonom di Asia Pasifik mengkritik APEC sebagai suatu forum kerjasama yang tidak mengalami kemajuan yang berarti terutama dalam enam tahun terakhir. Bahkan dalam usianya yang sudah 19 tahun, APEC dinilai terancam pecah. Niat APEC untuk mengurangi hambatan pada aliran perdagangan dan investasi tidak memperlihatkan gerakan. Menurut ekonom terpendang AS, APEC sedang berubah ke sistem perdagangan global yang terbagi tiga (*tripolar global trading system*). Hal itu menjadi ancaman bagi kesatuan APEC dan bertentangan dengan semangat WTO. Potensi keterpecahan APEC itu diutarakan ekonom AS, Dr Fred C Bergsten. Dia mengatakan, APEC kini tampaknya ebih tumpul. *The Early Voluntary Sectoral Liberalization* diprakarsai oleh AS untuk membuat APEC segera mengurangi hambatan perdagangan dan investasi di sektor tertentu-gagal terealisasi karena penolakan Jepang.

Penurunan tarif global berjalan lambat, termasuk dalam APEC, yang dipicu oleh kegagalan WTO, mempercepat liberalisasi perdagangan. Sejumlah anggota APEC mulai menciptakan kesepakatan perjanjian perdagangan bilateral sendiri atau dengan beberapa negara di kawasan. Padahal, rencana APEC adalah untuk membentuk satu kawasan perdagangan bebas tahun 2010 bagi anggotanya yang lebih maju dan tahun 2020 bagi anggota yang masih berkembang. Pada intinya

pembentukan APEC harus didukung oleh negara-negara yang tergabung dalam membentuknya sedari awal. Karena apabila Negara yang berkomitmen untuk memajukan Asia Tenggara hanya memiliki kepentingan tertentu dan memajukan negaranya sendiri. Maka tujuan APEC yang ingin meningkatkan perekonomian Negara-negara di ASEAN tidak akan terwujud dan hanya Negara tertentu saja yang akan menikmatinya. Negara yang belum terlalu berkembang akan sulit mengikuti perkembangan perekonomian Negara lainnya, dan pasti akan terjadi ketimpangan perekonomian

KESIMPULAN

Pembentukan kerja sama APEC didasari oleh negara dalam kawasan Asia Pasifik yang mengalami kesulitan ekonomi mulai pada tahun 1989. Mulai pada tahun tersebut para pemimpin negara-negara mulai mengadakan pertemuan multilateral yang ingin meningkatkan kerjasama ekonomi kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dinamika perkembangan Asia Pasifik yang semakin kompleks dengan adanya perubahan besar menjadi pandangan dibentuknya kerja sama APEC ini, sehingga negara memerlukan konsultasi satu sama lain. APEC merupakan suatu forum kerjasama di bidang ekonomi bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Forum kerjasama ini bersifat informal dan didasarkan pada prinsip kesetaraan dan sikap saling menghormati satu sama lain.

Negara-negara anggota APEC mengakui bahwa pembangunan pasar merupakan pendorong utama ekonomi untuk kawasan Asia-Pasifik, menciptakan sebuah komoditi pasar yang mampu menguntungkan negara anggota dengan menurunkan tarif MFN dalam tiap kawasan. Selain itu juga dibentuknya FTA dan RTA sebagai respon dari pembentukan FTAAP dapat dilakukan dengan cara melihat sektor mana yang memiliki potensi bagus untuk dikembangkan. Dampak dari pembentukan FTAAP ini akan menurunkan segala tarif dalam ekonomi APEC yang dianggap akan memberikan dampak baik pada perdagangan dan juga tuntutan keterbukaan perdagangan serta investasi dalam kawasan Asia Pasifik. Namun, kendala yang didapati oleh APEC ialah negara anggota masih belum mencoba untuk mengekspansi wilayah kerja sama mereka diluar wilayah kawasan Asia Pasifik.

Pada perkembangannya pada masa akhir-akhir ini, sedikit banyak APEC telah mengalami pergeseran tujuan dan misinya, yaitu dari kerjasama bidang ekonomi menjadi kerjasama bidang politik dan keamanan. Pergeseran fokus dan misi APEC ini terjadi karena kuatnya dominasi AS di APEC, yang selalu

memaksakan kepentingan politik dan ekonominya kepada negara-negara anggota APEC lainnya. Dominasi AS tersebut telah menimbulkan dampak lain yang cukup membahayakan masa depan APEC. Dampak lain yang dimaksud adalah timbulnya perpecahan di antara negara-negara anggota APEC. Dengan kondisi APEC yang sekarang, rasanya keberlangsungan dan besarnya manfaat APEC bagi negara-negara berkembang yang tergabung di dalamnya patut dipertanyakan.

DAFTAR PUSTAKA

- APEC. (2019). *APEC Regional Trends Analysis APEC at 30: A Region in Constant Change*. Retrieved from www.apec.org
- APEC. (2023). *Achievements and Benefits*. Retrieved September 18, 2023, from <https://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Achievements-and-Benefits>
- APEC Policy Support Unit. (2018). *APEC's Bogor Goals Progress Report*. Retrieved from <https://www.apec.org/Publications/2018/11/APEC-Bogor-Goals-Progress-Report>
- APEC Policy Support Unit. (2020). *Final Review of APEC's Progress Towards the Bogor Goals*. Retrieved from <https://www.apec.org/Publications/2020/11/Final-Review-of-APECs-Progress-Towards-the-Bogor-Goals>
- Asia-Pacific Economic Cooperation. (2004, November 11). *ABAC Recommendations to APEC Leaders*. Retrieved April 21, 2021, from https://www.apec.org/Press/News-Releases/2004/1111_abacrecmdleaders
- Asia-Pacific Economic Cooperation. (2008, November 22). *2008 Leaders' Declaration*. Retrieved April 21, 2021, from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2008/2008_aelm
- Asia-Pacific Economic Cooperation. (2010, November 12). *2010 Leaders' Declaration*. Retrieved April 21, 2021, from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2010/2010_aelm
- Asia-Pacific Economic Cooperation. (2016, November 20). *Annex A: Lima Declaration on FTAAP*. Retrieved April 21, 2021, from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2016/2016_aelm/2016_Annex-A
- Asia-Pacific Economic Cooperation. (2018, December 11). *What are the Bogor Goals?* Retrieved June 3, 2021, from <https://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Fact-Sheets/Bogor-Goals>
- Asia-Pacific Economic Cooperation. (2020a, November 20). *2020 Leaders' Declaration*. Retrieved April 22, 2021, from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2020/2020_aelm
- Asia-Pacific Economic Cooperation. (2020b, November 20). *APEC Putrajaya Vision 2040*. Retrieved April 22, 2021, from https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2020/2020_aelm/Annex-A
- Dwi, A. (2023, April 20). *India Salip Tiongkok dari Jumlah Penduduk Terbanyak Dunia*. Retrieved from <https://www.rri.co.id/sulawesi-utara/internasional/218017/india-salip-tiongkok-dari-jumlah-penduduk-terbanyak-dunia>
- Hsieh, P. L. (2013). *Reassessing APEC's role as a Trans-Regional Economic Architecture: Legal and Policy Dimensions*. *Journal of International Economic Law*, 16(1), 119–158. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgs045>
- Janow, M. E. (1996). *Assessing APEC's Role in Economic Integration in the Asia-Pacific Region*. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 17(2,3), 947–1013.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 8). *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Retrieved April 21, 2021, from https://kemlu.go.id/portal/id/read/164/halaman_list_lainnya/asia-pacific-economic-cooperation-apec
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*. Retrieved from Kerja Sama Regional website: https://kemlu.go.id/portal/id/read/164/halaman_list_lainnya/asia-pacific-economic-cooperation-
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2016, July). *Free Trade Area of Asia Pasific & ASEAN*. *Warta Ekspor*, 1–20. Retrieved from http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/6671486115504.pdf
- Langdon, F., & Job, B. L. (1993). *APEC beyond Economics and Politics*. *Pacific Review*, 8(2).
- Nugroho, R. A., & Jati, K. (2018). *Potensi Peningkatan Akses Pasar Produk Indonesia Ke Perekonomian Apec Untuk Mengantisipasi Realisasi Ftaap*. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 12(2), 135–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.30908/bilp.v12i2.324>
- Office of the Historian. (n.d.). *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), 1989*. Retrieved September 15, 2023, from Milestones: 1989–1992 website: <https://history.state.gov/milestones/1989-1992/apec>
- Prasetyo, S. A. (2011). *APEC dan Proses Integrasi Ekonomi Regional*. *Jurnal Kajian Wilayah*, 2(2), 258–273. Retrieved from www.apec.org